



REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC OF INDONESIA
NO 1 0060/0/1991 TANGGAL 1 26 JUNI 1991



TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991



REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1991

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0363/0/1991
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

1. bahwa dalam rangka memperluas daya tampung dan meningkatkan mutu pendidikan nasional maka perlu membuka dan menegerikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
2. bahwa untuk melaksanakan butir pertama diatas, dipandang perlu menetapkan pembukaan SLTP dan SLTA Negeri baru serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan tahun pelajaran 1990/1991.

Merasilangkan

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1988;
 - d. Nomor 226/M Tahun 1986;
 - e. Nomor 169/M Tahun 1987;
 - f. Nomor 64/M Tahun 1988.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - d. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - e. Nomor 013/P/1985 tanggal 12 Januari 1985;
 - f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan: Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-468/I/91 tanggal 27 Mei 1991

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menugaskan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan menjadi SLTP dan SLTA Negeri, di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi SLTP dan SLTA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran III Keputusan ini dan mata anggaran yang relevan.

- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
- a. SMP Negeri ada 7.261 buah;
 - b. SMA Negeri ada 1.779 buah;
- terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juni 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

Yang mewakili

Inspektur Jenderal,

ltd.

DRS. R. SOEDJOKO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

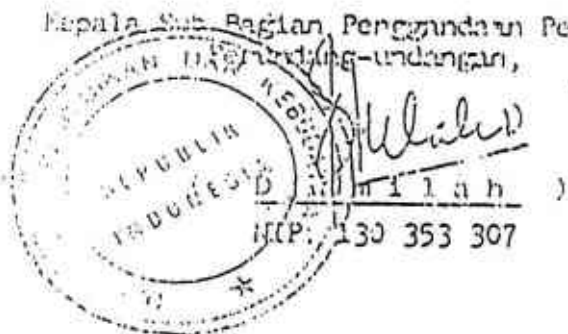
SALINAN Keputusan Ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

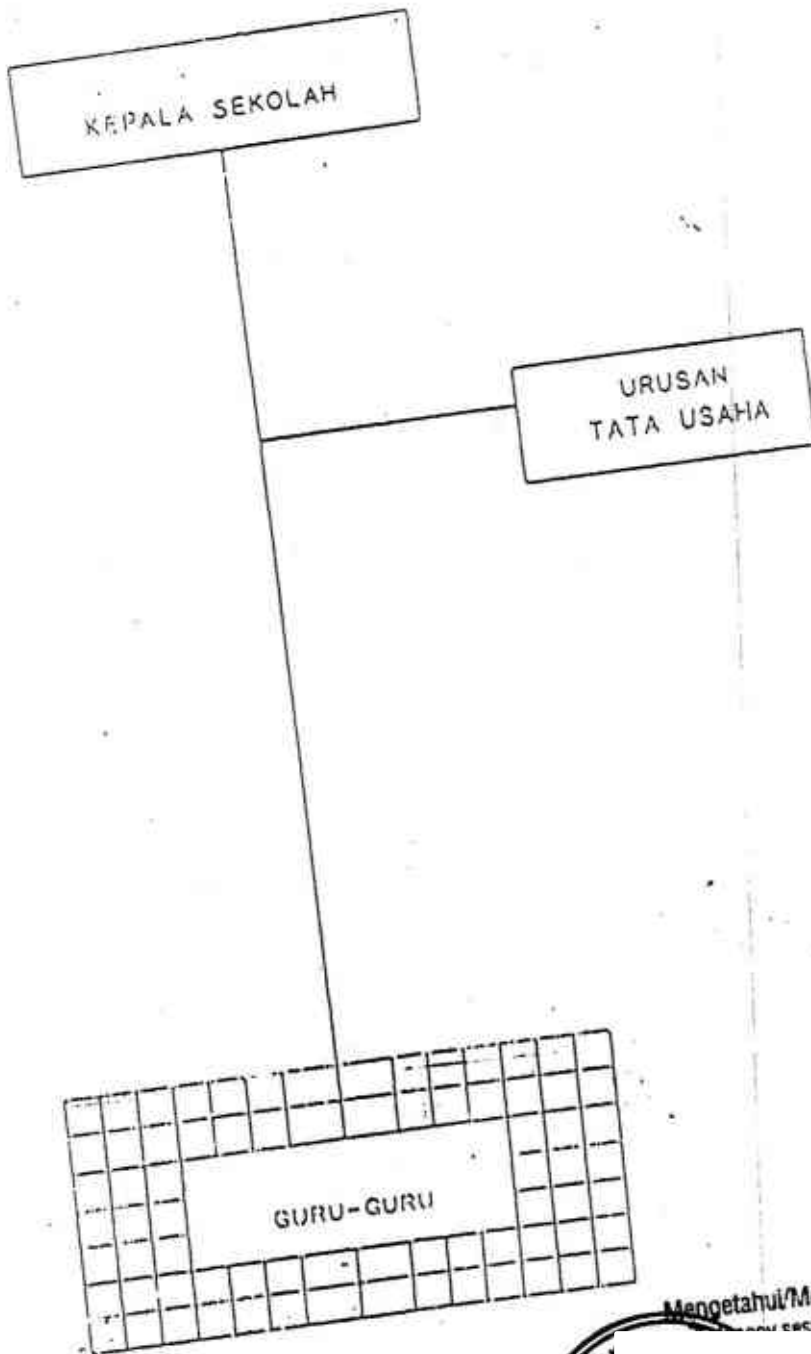
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Sub Bagian Pengundangan Peraturan Perundang-undangan,



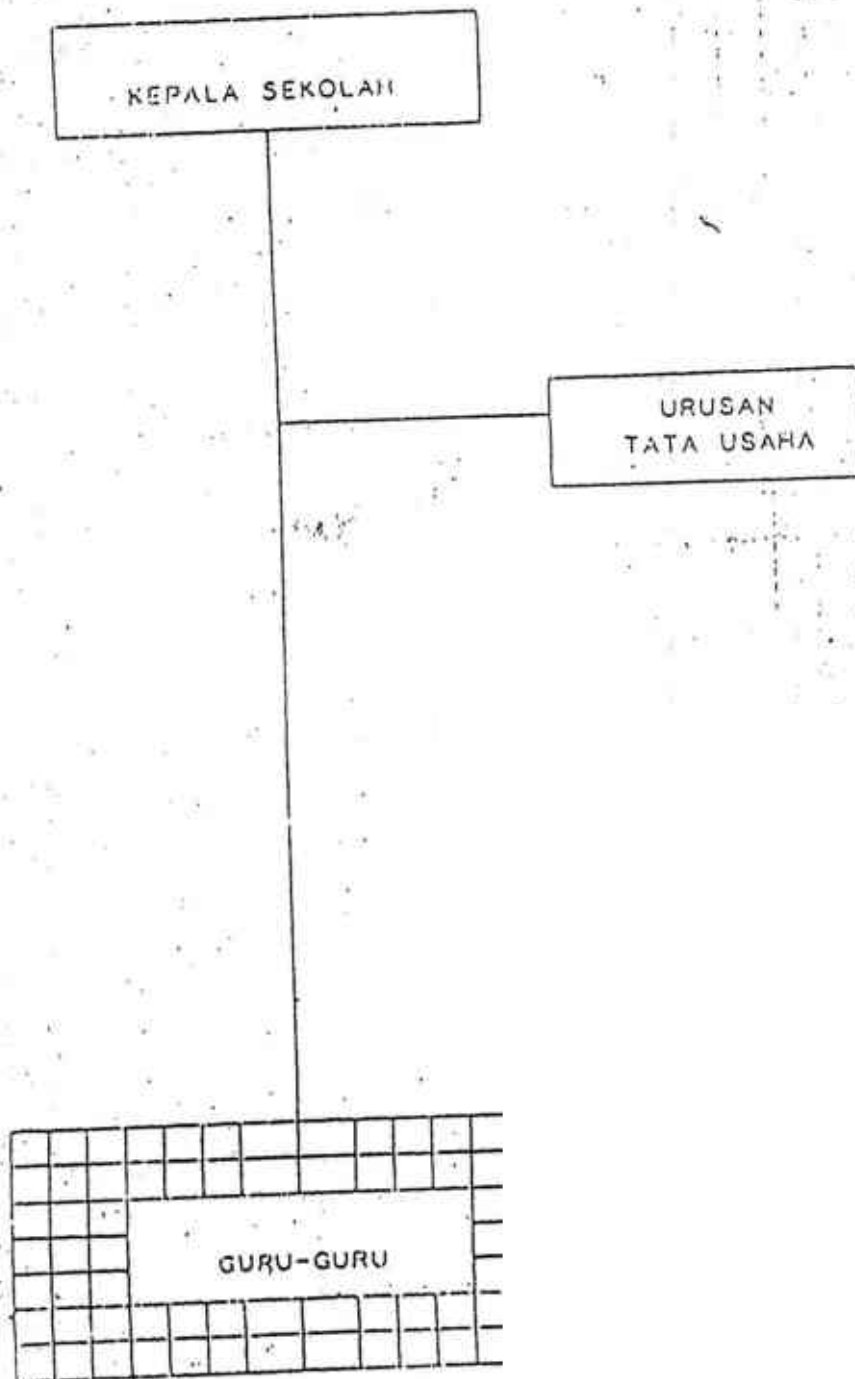
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0303/0/1991 TANGGAL 20 JUNI 1991

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



Mengetahui/Mengesahkan
sesuai dengan Aslinya

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



RUMAH SAKIT DAN PERUSAHAAN
SEKOLAH JURUSAN PELAJARAN 1990/1991

NO.	PROVINSI	P E R U B A H A N						JUMLAH	P E R E G E R J A N						JUMLAH SELURUSNYA		
		TR	SUR	GRUP	SMA	SMK/MA	SMT.P		STK	SD/PA	TE	SLE	SMG	SOA		SMA	SMT.P
1.	Jawa Barat	-	-	4	2	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
2.	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Jawa Timur	-	-	11	12	-	-	23	-	-	-	1	-	-	-	-	24
4.	DI. Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	DI. Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
7.	Sumatera Utara	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8.	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Jambi	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	3
11.	Sumatera Selatan	-	-	1	2	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	4
12.	Lampung	-	-	17	11	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	28
13.	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Kalimantan Tengah	-	-	9	5	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	14
15.	Kalimantan Selatan	-	-	15	4	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	19
16.	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Sulawesi Tengah	-	-	10	5	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15
19.	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Maluku	-	-	6	4	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
22.	Bali	-	-	6	4	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
23.	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Irian Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	81	52	-	-	133	-	-	2	5	-	-	-	-	140

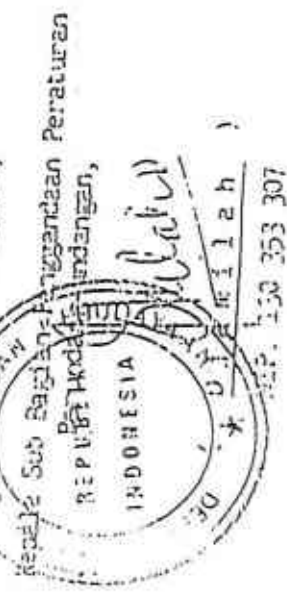
2	3	4	5	6	7
2. Jawa Tengah Pembukaan	1. SMP Negeri 2 Kasugihan 2. SMP Negeri 2 Kabasen 3. SMP Negeri 2 Leksono 4. SMP Negeri 3 Mertoyudan 5. SMP Negeri 2 Grogol 6. SMP Negeri 4 Karanganyar 7. SMP Negeri 2 Grobogan 8. SMP Negeri 2 Gajah 9. SMP Negeri 11 Pekalongan	-	Kasugihan Kebesen Leksono Mertoyudan Grogol Karanganyar Grobogan Gajah Pekalongan	Kabupaten Cilacap Kabupaten Banyumas Kabupaten Konosobo Kabupaten Magelang Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Karanganyar Kabupaten Grobogan Kabupaten Demak Kotamadya Pekalongan	09.1.2.1039.23.01.003.5110 09.1.2.1039.23.01.003.5120 09.1.2.1030.23.01.003.5150 09.1.2.1038.23.01.003.5210 09.1.2.1036.23.01.003.5220 09.1.2.1039.23.01.003.5230 09.1.2.1038.23.01.003.5250 09.1.2.1039.23.01.003.5350

1	2	3	4	5	6	7
	10. SMP Negeri 4 Slawi	-	Slawi	Kabupaten Tegal		
	11. SMP Negeri 2 Gringsing	-	Gringsing	Kabupaten Batang		
	12. SMA Negeri 1 Dayeuhluhur	-	Dayeuhluhur	Kabupaten Cilacap		
	13. SMA Negeri 1 Wangon	-	Wangon	Kabupaten Banyumas		
	14. SMA Negeri 1 Rembang	-	Rembang	Kabupaten Purbalingga ✓		
	15. SMA Negeri 1 Sepuran	-	Sepuran	Kabupaten Wonosobo		
	16. SMA Negeri 1 Candirotro	-	Candirotro	Kabupaten Temanggung		
	17. SMA Negeri 1 Loano	-	Loano	Kabupaten Purworejo		
	18. SMA Negeri 1 Jogonalan	-	Jogonalan	Kabupaten Klaten		

2	3	4	5	6	7
	19. SMA Negeri 1 Jatisrono	-	Jatisrono	Kabupaten Wonogiri	
	20. SMA Negeri 1 Sukodono	-	Sukodono	Kabupaten Sragen	
	21. SMA Negeri 1 Pegandon	-	Pegandon	Kabupaten Kendal	
	22. SMA Negeri 1 Lerengan	-	Lerengan	Kabupaten Brebes	
	23. SMA Negeri 1 Bojong	-	Bojong	Kabupaten Pekalongan	
Penerangan	24. SMA Negeri 1 Sragi	SMA Swasta Yapenda Sragi	Sragi	Kabupaten Pekalongan	

1	2	3	4	5	6	7
13. Timor Timur Pembukaan	1. SMA Negeri 1 Viqueque 2. SMA Negeri 1 Manufahi 3. SMA Negeri 1 Pante Makasar			Viqueque Manufahi Pante Makasar	Kabupaten Viqueque Kabupaten Manufahi Kabupaten Ambeno	09.1.2.1038.23.01.027.5110 09.1.2.1038.23.01.027.5120 09.1.2.1038.23.01.027.5150 09.1.2.1038.23.01.027.5210 09.1.2.1038.23.01.027.5220 09.1.2.1038.23.01.027.5230 09.1.2.1038.23.01.027.5250 09.1.2.1038.23.01.027.5350

Salinan sesuai dengan aslinya
 A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
 Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
 Kebudayaan,



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Sekretaris Jenderal
 yang mewakili,
 Inspektur Jenderal

ttd

DRS. R. SOEDJOKO